

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perempuan Indonesia, adalah komunitas yang memiliki keragaman dalam menyikapi berbagai bentuk persoalan kemasyarakatan, akan tetapi memiliki kesamaan dalam bentuk penindasan dan pengabaian yang dialami. Pengabaian hak dan penindasan yang disebabkan sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan. Hal yang terjadi di berbagai belahan dunia di mana pun, saat manusia eksis dengan ciri biologis perempuan dan laki-laki. Maka lahirlah perbedaan yang berujung diskriminasi, yang dipraktekan terus menerus sampai ada perubahan yang menghentikan praktek tersebut.

Pada mulanya pergerakan wanita masih merupakan usaha dari beberapa orang perempuan dan belum dibentuk dalam suatu perkumpulan. Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 pada dasarnya masih terbatas sifat dan tujuannya, yaitu menuju perbaikan kecakapan sebagai ibu rumah tangga. Tujuan yang sifatnya sosial kemasyarakatan kebangsaan belum dikemukakan.

Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo di Jakarta (1912). Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka

dan tegak dan melenyapkan tindakan malu-malu yang melampaui batas. Perkumpulan Keutamaan Istri didirikan pada tahun 1913 di Tasikmalaya, lalu pada tahun 1916 di Sumedang, 1916 di Cianjur, 1917 di Ciamis dan tahun 1918 di Cicurug. Pengajar yang terkemuka dari Perkumpulan Kautamaan Istri di tanah Pasundan adalah Raden Dewi Sartika. Sekolah Kartini juga didirikan di Jakarta tahun 1913, lalu berturut-turut di Madiun tahun 1914, Malang dan Cirebon tahun 1916, di Pekalongan tahun 1917, di Indramayu, Surabaya, dan Rembang tahun 1918. Di Yogyakarta pada tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang bersifat agama Islam dengan nama Sopa Tresna, yang kemudian pada tahun 1914 menjadi bagian wanita dari Muhammadiyah dengan nama Aisyah Perkembangan Gerakan Wanita.

Pada tahun 1920 mulai muncul perkumpulan wanita yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas daripada perkumpulan wanita sebelumnya. Di Minahasa didirikan De Gorontalosse Mohammedaansche Vrouwen Vereeninging, sedang di Yogyakarta didirikan perkumpulan Wanito Utomo yang mulai memasukkan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan ke arah perbaikan kedudukan perempuan pada umumnya.

Kongres perempuan Indonesia pertama dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 22- 25 Desember 1928. Terselenggaranya kongres ini dicetuskan oleh Nyonya Soekonto, guru di sekolah Belanda- pribumi dan anggota komite Wanita Utomo; Nyonya Suwardi, istri dan rekan Ki Hadjar Dewantoro; dan Nona Soejatin (yang menjadi Nyonya Kartowijono, guru perguruan Taman Siswa dan anggota komite Putri Indonesia. Hampir tiga puluh perkumpulan perempuan mengikuti kongres

ini. Aisjijah, Boedi Rini, Darmo Laksmi, Jong Islamieten Bond, Damesafdeling, Jong Java, Karti Wara, Koesoemo Rini, Margining Koeataman, Natdatoel Fataat, Panti- Krido- Wanito, Poetri Boedi Soedjati, Poetri Indonesia, Roekoen Wanodijo, Santjaja Rini, Sarekat Islam, Bagian Istri, Wanito Khatoliek, Wanito Kentjono, Wanito Oetomo, Wanito Moeljo, Boedi Wanito, Wanito Sedjati, Wanito Taman Siswa.

Tujuan kongres adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita tersebut. Tujuan perkumpulan antara lain memberikan penerangan dan perantaraan kepada perkumpulan yang menjadi anggotanya, memberikan “dana belajar” kepada anak perempuan yang pandai, mengadakan kursus kesehatan, menentang perkawinan anak-anak, dan memajukan kepanduan bagi anak-anak perempuan.

Pada ahirnya kongres membuat keputusan yaitu didirikannya badan permufakatan yang dinamakan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Pengurus besar diketuai oleh R.A. Soekonto, sedangkan perempuan lainnya yang juga sangat berperan dalam penyelenggaraan kongres diikut sertakan dalam dewan pengurusnya. Selama berlangsungnya kongres dan segera sesudah itu, kebanyakan organisasi ambil bagian dalam kongres menggabungkan diri dalam PPPI. Sedangkan organisasi yang tidak ikut bergabung adalah: Boedi Rini,, Sarekat Islam bag. Istri, Santjaja Rini, Wanito Moeljo, Jong Java dan Natdatoel Fataat. Catatan Ny. Toemenggoeng menyebutkan bahwa organisasi- organisasi itu memandang perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dewan pengurusnya

(Susan Blackburn 2007:XIIV). Bagi sebagian organisasi, kongres tersebut tentunya menunjukkan bahwa badan baru itu lebih radikal dari yang mereka harapkan, namun bagi sebagian organisasi lainnya kongres tersebut dianggap masih kurang jauh langkahnya, atau barang kali keikutsertaannya dalam PPPI diveto oleh badan yang dipimpin oleh yang berjenis kelamin laki- laki, seperti Sarekat Islam Bagian Isteri (S.I.B.I), Natdatoel Fataat

Usulan- usulan awal kongres tersebut juga memuat beberapa rekomendasi mengenai rencana kegiatan masa depan organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Panitia penyelenggara memang ingin menjadikan kongres sebagai tuan rumah sebagai diskusi antar perkumpulan- perkumpulan perempuan, menerbitkan majalah, membentuk dana guna membantu gadis- gadis miskin untuk meneruskan pendidikan menengah dan tinggi dan mendukung mosi kepada pemerintah yang isinya meminta kepada pemerintah agar menyediakan biaya untuk para janda dan anak yatim Indonesia. Dukungan dana bagi pendidikan gadis- gadis termuat juga dalam usulan dari Natdatoel Fataat. Panti Krido Wanito juga mengusulkan penerbitan majalah, JIBDA menginginkan agar badan yang baru itu dapat menyelenggarakan kursus- kursus tentang kebersihan bagi perempuan- perempuan di kampung- kampung maupun di desa- desa.

Pada ahir kongres, sebuah anggaran dasar dan rencana aksi untuk PPPI telah tersusun dan disetujui. Anggaran dasar itu menyatakan bahwa PPPI bermaksud menjadi badan penghubung bagi semua perkumpulan perempuan Indonesia dan bertujuan memperbaiki nasib dan status perempuan Indonesia tanpa adanya perbedaan terhadap sesuatu agama atau keyakinan politik tertentu. Ini berarti perlu

dicarikan cara- cara untuk dapat menyelenggarakan kongres setiap tahun agar isu- isu yang berkaitan dengan perempuan dapat dicarikan solusinya dan untuk alat komunikasi perlu diterbitkan sebuah majalah berita sebagai forum diskusi bagi perempuan, bahkan diharapkan dapat bertindak sebagai penengah atas perbedaan pendapat yang ada diantara para anggotanya. Anggota PPPI terdiri dari organisasi- organisasi yang memiliki angaran dasar yang biasa dan para anggotanya adalah perempuan- perempuan Indonesia asli. Anggotanya diharuskan membayar uang iuran dan organisasi yang menjadi anggota memiliki satu suara. Kepemimpinan adalah sebuah dewan pengurus yang terdiri paling sedikit lima orang, yang dipilih kongres dalam waktu satu tahun dan dewan pengurus akan menentukan tempat yang untuk sementara adalah di Yogyakarta.

PPPI diagendakan membentuk suatu wadah dana beasiswa bagi pendidikan gadis- gadis miskin, memajukan gerakan pandu putri. Semua anggota PPPI dianjurkan melakukan propaganda melawan perkawinan anak-anak dan meminta pegawai negeri untuk membantu mendidik masyarakat mengenai hal itu. Pengurus besar PPPI mengirim resolusi- resolusi kepada pemerintah yang berisikan permintaan agar secepat mungkin dibentuk dana untuk mendukung para janda dan anak yatim. Mosi ini harus diumumkan kepada dewan rakyat (*Volksraad*), dan juga di dalam pers. Kongres juga mendengarkan uraian mengenai persyaratan yang menurut hukum Islam dapat dimasukan dalam kontrak perkawinan. Kebanyakan perempuan merasa tidak tahu bahwa dalam persyaratan Islam perempuan berhak untuk mengajukan perceraian. Praktek ini disebut *talik* dan ini merupakan cara perempuan memperoleh perceraian dan sekaligus melindungi mereka dari poligami, karena jika suami kawin lagi, maka perkawinan yang sekarang dapat

dibatalkan. Kongres mengambil resolusi bahwa PPPI akan mengirim mosi kepada dewan- dewan keagamaan berisi usulan agar hukum talik difasilitasi menurut hukum Islam dengan cara dituliskan. Disetujui juga bahwa PPPI akan meminta pemerintah agar mewajibkan pemimpin agama Islam untuk menjelaskan ketetapan ini secara tertulis kepada setiap calon pengantin dan untuk mengumumkan rekomendasi kongres ini, khususnya tentang talik ini dalam Volksraad dan pers.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dalam memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.
2. Keterbelakangan wanita Indonesia dalam bidang pendidikan dan sosial budaya.
3. Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia menjadi badan penghubung bagi semua perkumpulan perempuan Indonesia dan bertujuan memperbaiki keadaan perempuan tanpa adanya perbedaan terhadap sesuatu agama atau keyakinan politik tertentu.
4. Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia menjadi media komunikasi antar anggota untuk memecahkan masalah- masalah yang dihadapi oleh perempuan- perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan dan sosial budaya.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah pada poin pertama di atas yaitu Peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dalam memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas inti permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan rumusan masalah yang dapat mempermudah penelitian. Berangkat dari deskripsi latarbelakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dalam memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dalam memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

Melalui penelitian ini diharapkan kita dapat:

1. Memperoleh pengetahuan tentang Peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dalam memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.

2. Sumbangan bacaan mengenai Peran organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dalam memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.
3. Memberikan gambaran mengenai usaha wanita Indonesia dalam memperbaiki keadaan mereka dalam pendidikan dan sosial budaya tahun 1928- 1933.
4. Sebagai sumbangan bacaan mengenai peran organisasi perempuan dalam upaya untuk mengawali pergerakan perempuan Indonesia tahun 1928- 1933.

### **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

Subjek Penelitian : Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI)

Objek Penelitian : Memperbaiki keadaan perempuan Indonesia bidang pendidikan dan sosial budaya.

Tempat Penelitian : Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung

Waktu Penelitian : 2009/2010

Temporal : 1928- 1933

Bidang Ilmu : Sejarah



## REFERENSI

Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Halaman xxv

Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Halaman xiiv